eureka media aksara

Legalitas PERKAWINAN ANTAR WARGA NEGARA

DI KECAMATAN ANJATAN KABUPATEN INDRAMAYU

Jika Di Tinjau Dari Segi Hukum Islam
Yang Di Hubungan Dengan Pasal 56-62
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

A. Junaedi Karso

Penerbit:
CV. EUREKA MEDIA AKSARA
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-5581-62-0

LEGALITAS PERKAWINAN ANTAR WARGA NEGARA DI KECAMATAN ANJATAN KABUPATEN INDRAMAYU JIKA DI TINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM YANG DI HUBUNGAN DENGAN PASAL 56-62 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

A. Junaedi Karso

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

LEGALITAS PERKAWINAN ANTAR WARGA NEGARA DI KECAMATAN ANJATAN KABUPATEN INDRAMAYU JIKA DI TINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM YANG DI HUBUNGAN DENGAN PASAL 56-62 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Penulis : A. Junaedi Karso

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Sakti Aditya, S.Pd., Gr.

ISBN : 978-623-5581-62-0

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, MEI 2020**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2021

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr, Wb
Bismillahirohmanirohim

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan selalu kepada "**Allah SWT"** atas Rahmat, Taufiq, dan Hidayah yang sudah diberikan sehingga kami bisa menyelesaikan Buku tentang **"LEGALITAS PERKAWINAN ANTAR WARGA NEGARA DI KECAMATAN ANJATAN KABUPATEN INDRAMAYU JIKA DI TINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM YANG DI HUBUNGAN DENGAN PASAL 56-62 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**".

Kami mohon beribu-ribu maaf apabila ada kesalahan, referensi, kutifipan atau salah menorehkan sumber-sumber buku terkait **"LEGALITAS PERKAWINAN ANTAR WARGA NEGARA DI KECAMATAN ANJATAN KABUPATEN INDRAMAYU JIKA DI TINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM YANG DI HUBUNGAN DENGAN PASAL 56-62 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN".** Kami sadar bahwa penulisan buku ini bukan merupakan buah hasil kerja keras kami sendiri yang kami kutif dari berbagai sumber baik dari buku, jurnal, desertasi, tesis, skripsi, website, media serta sumber lainnya. Ada banyak pihak yang sudah berjasa dalam membantu kami di dalam menyelesaikan buku ini, seperti pengambilan data, pemilihan contoh, dan lain-lain. Maka dari itu, kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan wawasan dan bimbingan kepada kami sebelum maupun ketika menulis buku panduan ini.

Kami juga sadar bahwa buku yang kami buat masih tidak belum bisa dikatakan sempurna. Maka dari itu, kami meminta dukungan dan masukan dari para pembaca, agar kedepannya kami bisa lebih baik lagi di dalam menulis sebuah buku.

Akhirnya, kami berterima kasih kepada semua pihak,

yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu yang turut serta membidani kelahiran buku ini. Semoga **Allah SW**T membalas kebaikan Anda-Anda semua. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Billahit taufiq walhidayah,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI v
BAB 1 PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Prosesi Perkawinan Antar Warga N egara di Indramayu 2
BAB 2 PERKAWINAN 4
A. Pengertian Perkawinan 4
B. Perkawinan Antar Negara 7
C. Legalitas Perkawinan Antar Negara 7
D. Tujuan Perkawinan Antar Negara 9
E. Akibat Dari Perkawinan Antar Negara Terhadap Harta Benda 9
F. Masalah Hukum Adat Jika Tidak Adanya Perkawinan 11
BAB 3 PERCERAIAN 13
A. Menurut Hukum Islam 13
B. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata / BW (187) 20
C. Menurut Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 27
BAB 4 AKIBAT YURIDIS DARI SUATU PERKAWINAN YANG ILEGAL 34
A. Profil Anjatan 34
B. Akibat Perkawinan Ilegal 35
C. Syarat-syarat Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang 40
D. Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Islam 41
E. Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah 46
BAB 5 PENCERAIAN ADAT DI INDRAMAYU 50
A. Terjadinya Perceraian 50
B. Alasan-alasan Dari Perceraian 54
C. Usaha-usaha Pencegahan Perceraian 57
D. Tata Cara Melakukan Permohonan dan Gugatan Perceraian 60
E. Tata cara Tentang Gugatan Perceraian 61
F. Masalah Harta Bersama 64
G. Harta bersama antara suami isteri 67

DAFTAR PUSTAKA 77
LAMPIRAN 80
TENTANG PENULIS.....117

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia yang terdiri dari berbagai suku serta adat istiadat yang berbeda antara suku yang satu dengan suku yang lain, demikian juga mengenai perkawinan terhadap masing – masing suku dan adat istiadat tersebut.

Didalam penjelasan umum sub. 2 Undang–undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bagi berbagi golongan, warga negara dan berbagai warga daerah seperti berikut :

1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama islam talah diresepsi dalam Hukum Adat;
2. Bagi orang Indonesia asli lainnya berlaku Hukum Adat;
3. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijke Ordonantie Chisten Indonesiers (HOCI) Staatblad 1933 Nomor 74;
4. Bagi orang Timur Asing lainya dan WNI Keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
5. Bagi orang Timur lainnya dan WNI Keturunan Timur Asing lainya serta WNA tersebut berlaku Hukum Adat mereka;
6. Bagi orang-orang Eropa dan WNI Keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata

BAB 2 | PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan

Pekawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan abadi berdasarkan ketentuan Yang maha Esa, Pasal I UU No. 1 tahun 1974. Dari pengertian tersebut di atas dapat di lihat ada beberapa unsur dari perkawinan itu sendiri, Yaitu :

1. Adanya ikatan lahir batin
2. Antara seorang pria dan seorang Wanita
3. Sebagai suami isteri dan membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan abadi;
4. Berdasarkan ketentuan yang Maha Esa

Adanya ikatan lahir batin

Berarti adanya persetujuan dan persesuaian kehendak yang berdasarkan atas kemauan yang suci untuk mengadkan ikatan dalam status suami isteri yang mempunyai pengaruh besar terhadap masyarakat lingkuannya, oleh karena itu masyarakat haruslah menghormati ikatan tersebut.

Antara seorang pria dan sorang wanita

Dalam unsure ini terkandung suatu prinsip bahwa azas perkawinan adalah monogamy. Jadi seorang suami pada

BAB 3 | PERCERAIAN

A. Menurut Hukum Islam

Kata penceraian ini sebenarnya arti yang ama dengan putusnya perkawinan, di samping itu juga bahwa kata penceraian ini lebih sering di ucapkan dalam masyarakat, sebab lebih praktis untuk di dengar walaupun perceraian ini merupakan akibat yang sangat buruk sekali.

Sebagaimana telah di ketahui bahwa perceraian ada karena adanya perkawinan. Dimana tidak ada perkawinan maka tidak ada perceraian. Karena itu perkawinan merupakanawal hidup bersama sebagai suami isteri dan dan perceraian sebagai akhir hidup antara suami isteri. Dalam islam di tentukan bahwa hanya dua kali saja yang memperolehkan talaq yang di rujuk dalam masa iddah, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an

> "Talaq yang dapat di rujuk duakali, setelah itu boleh rujuk kembali dengan cara yang ma'ruf. Atau menceraikannya dengan cara yang baik"

Apabila suami telah melakukan talaq yang ketiga kali maka habislah hak talaq suami, karena itu hilang pula haknya untuk rujuk kembali kepada isterinya. Dalam hal ini ada pengecualian, dimana jika bekas isterimya telah menikah dengan laki-laki lain/suami lain yang telah di sempurnakan kehidupan itu serta telah di talaq pula oleh suami lain itu. maka

BAB 4

AKIBAT YURIDIS DARI SUATU PERKAWINAN YANG ILEGAL

A. Profil Anjatan

Sebelum kita membahas Akibat Yuridis Perkawinan yang Ilegal, terlebih dahuku kita membahas Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, dimana kecamatanAnjatan merupakan salah satu Kecamatan yang keberadaannya di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Anjatan terletak paling timur wilayah Kabupaten Indramayu. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bongas dan Patrol. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sukra. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Hargeulis. Sedangkan, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Subang.

Luas wilayah Kecamatan Anjatan adalah 7.676 KM2. Kecamatan Anjatan terdiri dari 13 desa. Berikut adalah data BPS tahun 2017 secara lengkap:

BAB 5

PENCERAIAN ADAT DI INDRAMAYU

A. Terjadinya Perceraian

Sebagaimana kita ketahui bahwa perceraian ada karena adanya perkawinan, karena apa bila tidak ada perkawinan tentu tidak akan ada perceraian. Karena itu perkawinan merupakan awal hidup bersama sebgai suami istri dan perceraian merupakan akhir hidup bersama suami istri.

Menurut ketentuan pasal 38 Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian serta atas keputusan pengadilan.

Dalam bab ini penulis akan menguraikan perihal perceraian di daerah Kabupaten Indramayudengan segala aspek yang menyebabkan terjadinya perceraian tersebut. Dalam hal ini yang menjadi latar belakang terjadinya suatu perceraian di Indramayu adalah sebagai berikut :

1. Karena rendahnya tingkat pendidikan Masyarakat.
2. Karena rendahnya pendapatan perkapita (Ekonomi).
3. Karena kawin usia muda.

Ad. 1. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat :

Tingkat pendidikan yang rendah dari dari masyarakat menyebabkan banyak dilakukan perceraian. Hal tersebut dikarenakan dengan rendahnya pendidikan maka kurang memahami apa

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Djuher,Hukum perkawinman Islam dan Relevansinya, Dewa Ruci Perss, Jakarta 1982.

Hadi Kusumah dan Hilman, Hukum Waris, Adat, Alumni, Bandung 1980.

Lili Rasjidi, Alasan Perceraian menurut Undang-undang No. 1 Tahu 1974 Tentang Perkawinan, Alumni Bandung 1983.

Subekti, Perbandingan Hukum Perdata, Pradya Paramita, Jakarta 1972.

Asnawi, Mohd., *Himpunan Peraturan dan Undang-undang RI tentang Perkawinan, Semarang,* Perwakilan Departemen Agama, 1975.

Departemen Agama RI., Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta PT. Bumi Restu, 1974

Departemen Agama RI., Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta PT. Penerbit Kitab Suci Al-Qur'an, 1974

Departemen Agama RI., Himpunan Fatwa Pengadilan Agama, Jakarta, Proyek Pembinaan Peradilan Agama, 1980/1981.

Ismuha, H., Pencaharian Bersama Suami istri di Indonesia, Jakarta, Bulan BIntang, 1978.

Latif, Djamil H.M., Aneka Hukum Penceraian di Indonesia, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982.

Ramulyo, Idris Mohd., Akibat Yuridis dari Perkawinan di Bawah Tangan, Jakarta Majalah Hukum dan Pembangunan tahun, X, 1982.

____, HImpuna Kuliah Hukum Islam II Jakarta Bursa Buku Fakultas Hukum Universitas Indonesia 1981.

____, Bunga Rampai Hukum Perorangan dan kekeluargaan dan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama, Jakarta, 1982.

Rasyid Sulaiman H., Fiqh Islam, Jakarta Attahiriyah, Jatinegara, 1954. Saleh, Wantjik, K., HUkum Perkawinan Indonesia, Jakarta Ghalia Indonesia, 1976.

Subekti, R. Mr. dan Tjitrosudibio R., KItab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarta, J.B. Wolters, 1980.

Shiddiqie, Ash Hasbi T.M., Pedoman Rumah Tangga, Medan, Pustaka Maju. 1971.

Tholib, Sayuti, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta Universitas Indonesia, 1974.

_____, Kuliah Hukum Islam II pada Fakultas HUkum Universitas Indonesia, 1979/1980.

BERITA TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

Berita Bauana Minggu , 28 Pebruari 1979.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya,* Jakarta, Proyek penerbitan kitab suci Al-Qur'an, 1978. Pustaka Antara, 1975.

Hamid, Zahry, H., *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan Islam,* Jakarta, Penerbit Bina Cipa, 1978.

Haryono,Anwar, *keluwesan dan Keadilan Hukum Islam,* Jakarta penerbit Bulan Bintang, 1968.

Hazairin, *Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan hadis,* Jakarta, Penerbit Tintamas, 1964.

Tujuan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Penerbit Tintamas, Jakarta, 1974.

Husein, Ibrahim, *fiqh perbandingan dlam Masalah NTR dan Hukum kewarisan,* Jakarta, Penerbit Ihya Ulumuddin, 1971.

Majalah Tempo, Penerbit PT. Grafiti Pers Tahun Ke V No. 21 dan No. 46 tahun 1975.

Mingguan Sinar Pagi, Tahun ke V tanggal 12 September 1982.

Rasyid, Sulaiman H; Fiqh Islam, Jakarta, Penerbit Attahiriyah, 1954.

Siong Giok, Gouw, *Hukum Pedata Internasional Indonesia,* Buku Keempat, Jakarta, Penerbit PT. Kinta, 1964.

Sismono, *aspek-aspek Kehidupan Tentang Narkotika, Alkoholisme, pornografi, kehidupan seksual.*

Suhartati, Sri Indah, Ny; Pengadilan Agama yang di Cita-citakan, *Kertas kerja Pada Penataran Dosen Hikum Islam Fakulitas Hukum Universitas negeri Seluruh Indonesia,* Gama Yogyakarta, 1976.

Thalib, Sayuti, *Hukum kekeluargaan Indonesia,* Jakarta, Penerbit UI Perss, 1974.

Undang-undang No. 1 tahun 1974, penerbit Pradnya paramita, Jakarta, 1977.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berikut penjelasan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perceraian Prosedur Berpekara Pada Pengadilan Agama, Proyek Pembinaan Badan. Peradilan Agama, Tahun 1982/1983

LAMPIRAN

Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 1974

Tentang

Perkawinan

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 29 Undang-undang Dasar 1945.

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

TENTANG PENULIS

A Junaedi Karso lahir di Indramayu, pada 20 September 1975. Selain menulis, ia juga merupakan Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar. Puluhan karya tulis ilmiah telah diterbitkan di jurnal nasional dan internasional. Di antara karya yang terbitkan jurnal nasioal tahun 2020 adalah *Legal Study Concerning Provison of The Development of Environmental Funds in Development of Building Storage of Evidence Goods and Household Resistance of North Sumatera,* (Res Nulius Law Journal, 2020) dan *Penerapan Tatakelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) di Bidang Pengamanan Asset untuk Meminimalisir Pencurian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di PTPN IV,* (Res Nulius Law Journal, 2020).

Sementara, jurnal nasional yang terbit pada tahun 2019 antara lain Call Centre Brigade Siaga Bencana sebagai Strategi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bantaeng, (Jurnal Dinamika Pemerintahan, 2019); Partisipasi Politik Masyarakat dalam Diskursus Kolam Kosong Pada Pilbup di Kabupaten Enrekang, (Gorontalo Journal of Government and Political Study, 2019); Kerjasama BNN dan Kepolisian dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Rappucini Makassar, (Jurnal MODERAT, 2019); Implementasi Kebijakan Perlindungan Khusus pada Program Kota Layak Anak di Kota Makassar, (Journal of Government and Civil Society, 2019); Peran Humas dalam Menyebarluaskan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Bantaeng, (Jurnal Komunikasi dan Organisasi JKO, 2019); dan Legal Study about Demotion of The Indonesia National Army and Police in The Director of Sea Transportation, The Ministry of Transportation of The RI, (Res Nulius Law Journal, 2019).

Adapun karya yang terbit di jurnal internasional pada tahun 2019 antara lain Factor That Affect Governance of Land Administration service in Anjatan Districty, (International Jurnal of Social Science Humanities Research, 2019); dan Improving The Quality of Public Service: Study of Land Administration Service in Anjatan District, Indramayu Regency, (IJO-International Journal of Social Science and Humanitities Research, 2019);

Karya di jurnal internasional yang terbit tahun 2020 antara lain Regional Asset Management Mechanism Based on Government Law and Regulation in Indonesia, (East African Scholar Journal of Economics, business and Management, 2019); Public Policy for Environmental Regulation and Its Impact on the Business Performance of Restaurants in Thailand, (International Journal of Innovation, Creativity and Change (Scopus), 2020); Effort to Prevent Bureaucratic Corruption on The Pierching Principles of The Governance Veil in Realizing Good Governance and Clean Governance in Indonesia, (Journal L Sociale, 2020); Effort to Increase the Fisherman Income Through Finance Management of The Independent Fisherman Group in Village Matirro Bombang, Pangkep Regency, (Journal La Bisecoman, 2020); Legal Review of Port Cooperation Agreement: Strength Assessment between Law Number 17 of 2008 Concerning Ports, (South Asian Research Journal of Humanitues Social Sciences, 2020); Government Handling and Policies in Overcoming The Covid-19 Pandemic in Indonesia, (East African Scholar Journal of Education and Literature, 2020); Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in The Field of Securing Plantation Assets, (Journal La Sociale, 2020); The Effect of Implemeting Mixed Marriage Policies on Improving Public Welfare, (International Journal of Mechanical and Production engimeering Research and Development (IJMPERD) (Scopus), 2020); Prespective of Cooperation in the Port based on the Principle of Salus Populi Suprema Lex, (Artech Journsl of Art and Socisl Sciences (AJASS), 2020); Good Governance in the Management of Village-owned Enterprise: Review of Legal Prespective, (IAR Journal of Humanities and Social Sciences, 2020); Village Fund

Management: Risks in Management of Village-Owned Enterpreses, (Artech Journal of Current Business and Financial Affair (AJCBFA), 2020); dan Improving the Quality of Sea Transportation Licensing Service throught Digital Technology-based Losencing Service, (Solid State Technology Archives Available, 2020). - Pencegahan penyalahgunaan dana badan usaha milik desa (bumdes) menuju good governance of bumdes yang berdasarkan prinsip government judgement rulehttp://jurnal.ummu.ac.id/index.php/jgoa, 2021)

Pendidikan formalnya bermula dari MI Tarbiyah Wata'lim Indramayu (lulus tahun 1989), MTs Al-Wahab Jakarta (lulus tahun 1992), MA Al-Huda Jakarta (lulus tahun 1995), S1 FIH Indramayu (lulus tahun 2006), S2 FIP Tangerang (lulus tahun 2008), dan S3 FIP Jakarta (lulus tahun 2017). Selain itu, ia juga mengambil S2 FIH Medan (lulus tahun 2020). Untuk pendidikan non formal meliputi Mengetik Manual di Mars College Jakarta tahun 1995, Mengetik IBM di Mars College Jakarta tahun 1996, Komputer di Mars College Jakarta tahun 1996, Akutansi Bon A Bon B di PKBMN Jakarta tahun 1997, Beginner Course di PKBMN Jakarta tahun 1996, Free Elementary di PKBMN Jakarta tahun 1996, Elementary One di PKBMN Jakarta tahun 1996, Elementary Two di PKBMN Jakarta tahun 1996, Intermedite One di PKBMN Jakarta tahun 1998, Intermedite Two di PKBMN Jakarta tahun 1998, Advance di PKBMN Jakarta tahun 1998, Conversation di Mars College Jakarta tahun 1996, dan Perpajakan di Dirjen Pajak Jakarta tahun 2010.

Sementara, pendidikan dan pelatihan yang diikuti antara lain My Dreams Future Procurement break Through di LPKN tahun 2020, *Certificate Prourement Contract Legal Expert* (CPCLE) di *International Frederation of Procurememt Bar Association* (IFPB) tahun 2020, Certificate Procurement in Perpetice ISO di Nevi Belanda tahun 2020, Implementasi System Thinking dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di LPKN tahun 2020, Pelatihan & Sertifikasi Kompetensi Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Pengadaan Barang/Jasa di LPKN/Angkasa Pura/Surveyor Indonesia tahun 2020, Dinamika Balcklist dalam Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun

2020, Diklat Menghadapi Audit & Resiko Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di LPKN tahun 2020, Pengadaan Barang/Jasa dari berbagai Perspektif di LPKN tahun 2020, Sistem Manajemen Mutu (Understanding and Implementing ISO 9001:2015) di LPKN tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Assesor Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Pendampingan KUKM di BNSP tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Pendampingan KUKM di BNSP tahun 2020, Diklat Aspek-Aspek Perancangan Bangunan di LPKN tahun 2020, Diklat Persiapan & Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, Memahami Ilmu Pengadaan & Peluang Mendapatkan Proyek Pemerintah (Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah) di LPKN tahun 2020, Pengalaman Lapangan pada Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, Pengadaan Jasa Konstruksi Pasca Hadirnya Permen PUPR No.14 Tahun 2020 dan SE No. 22 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Persyaratan Pemilihan & Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Diklat Strategi Pengadaan Tahun 2021 & Penyelesaian Pekerjaan Akhir Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Diklat Pinjam Bendera dalam Pengadaan Perspektif Realita Lapangan & Ketentuan Per-UU di LPKN tahun 2020, Pelatihan Pengadaan Barang & Jasa Sitem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) di LPKN tahun 2020, Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Awarness, Understanding & Implementing Quality Management System di LPKN tahun 2020, Diklat Persiapan & Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, dan Pengadaan Jasa Konstruksi Pasca Hadirnya Permen PUPR No.14 Tahun 2020 dan SE No. 22 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Persyaratan Pemilihan & Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, New Normal Penyelenggaraan Jasa Konstruksi "*How to Perform While Transform*" di LPKN tahun 2020, Pemberian Kesempatan dengan Perpanjangan Masa Kontrak di LPKN tahun 2020, Strategi BUMN menuju Transformasi Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Meningkatkan Kualitas Pengadaan melalui Quality

Assurance dalam Era Industri 5.0 di LPKN tahun 2020, Pengadaam Mutu Konstruksi di LPKN tahun 2020, Pelaku Pengadaan: Konsep Pengenalan Sederhsns Perpres No.16/2018 bagi PNS di LPKN tahun 2020, Perijinan Terintegrasi (OSS) pada Pengadaan Barang & Jasa di LPKN tahun 2020, Jerat & Celah Hukum Pengadaan dalam Keadaan Darurat di LPKN tahun 2020, Pembekalan Teknis untuk Pejabat Pengadaan Barja di LPKN tahun 2020, SMK 3 Konstruksi di LPKN-BNSP tahun 2020, di LPKN tahun 2020, NNLP Practitioner di LPKN-Neo NNLP tahun 2020, Master NNLP Practitioner di LPKN-Neo NNLP tahun 2021, Pembekalan Teknis bagi PPK dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan TA 2020 & Kompetensi Pejabat PPK di LPKN tahun 2021, Training of Trainer (TOT) di BNSP tahun 2020, Penerapan Kontrak Kerja Konstruksi di BNSP tahun 2020, Persiapan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa di BNSP tahun 2020, *Training of Trainer* (TOT) Internasional di IPB-KAN tahun 2021, Training of Trainer (TOT) BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, Pengelolaan Lembaga Pelatihan BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, Metodologi Pelatihan Jarak Jauh BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, *Certified International Quantitative Research* (CIQnR) di Quantum HRM International_KAN tahun 2021, *Certified International Qualitative Research* (CIQaR) di Quantum HRM International_KAN tahun 2021,

Pengalaman kerja meliputi guru di SMP Pemda Anjatan tahun 1998-2002, guru SMP PGRI Anjatan tahun 1998-2002, guru di SMAN 1 Anjatan tahun 2001-2002, dosen Unidarma Indramayu tahun 2006-2012, dosen Unma Majalengka tahun 2006-2012, dosen STMY Majalengka tahun 2010-2012, manager Primkoppol Denmabes Polri tahun 2003-2013, dosen Universitas Indonesia Timur tahun 2012-2013, dosen Universitas Satria Makassar tahun 2013-2014, Sekretaris Rektor Universitas Satria Makassar tahun 2012-2014, Tenaga Ahli Hukum & Pemerintahan Ketua Fraksi PKS Fraksi PKS DPRD Kabupaten Indramayu tahun 2012-2014, *Personal Expert Consultant* KSOP Sunda Kelapa tahun 2014-2015, Tenaga Ahli Primkoppol Denmabes Polri tahun 2016-2017, Wakil Ketua Primkoppol Denmabes Polri tahun 2016-2017, Personal Expert

Consultant KSOP Gresik tahun 2016-2017, dosen Unismuh Makassar tahun 2013 S/d Sekarang, Dosen STIP-AN Jakarta tahun 2017-2018, Konsultan Hukum & Pengamanan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan – Sumatera Utara tahun 2017 S/d Sekarang, Personal Expert Consultant di KS Internasional Pelabuhan Tanjaung Priok tahun 2019-2020, dan Personal Expert Consultant di Dirkapel tahun 2020 Sd/ Sekarang, Konsultan Hukum PT. Perkebunan Nusantara XIII Kalimantan Barat Agustus 2021 S/d Sekarang.

Untuk berkorespondensi bisa menghubungi nomor kontak +62813 2417 8569 atau email Bintang.lyatiara66@gmail.com, juga bisa berkunjung di Ilmu Pemerintahan FISIP. Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar.

Makassar, 18. September 2021
Hormat Kami,

A.Junaedi Karso